

B A B IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi BPMPT Provinsi Jawa Barat juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat, dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat baik terhadap Gubernur maupun kepada seluruh masyarakat Jawa Barat.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2016), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam

Renstra dan Renja 2016, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat ke depan.

Pertama, walaupun satu IKU BPMPT telah mencapai target yang sangat baik yaitu jumlah realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa Barat, namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Jawa Barat bagian selatan serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Jawa Barat.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Jawa Barat akan meningkat.

Ketiga, perlu segera dibangun gedung baru BPMPT Provinsi Jawa Barat karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan BPMPT kepada pemohon izin walaupun sudah dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara online namun masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung.

Keempat, masih lemahnya koordinasi BPMPT dengan Kabupaten/Kota dan OPD/Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara BPMPT Provinsi Jawa Barat dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maupun juga dengan OPD/Dinas Teknis.

Kelima, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan

BPMPT Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.